

**PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
HAJIMENA KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

(Skripsi)

OLEH

MAYA YULIANTINA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF POLITICAL CONSCIOUSNESS TOWARD POLITICAL PARTICIPATION IN VILLAGE HEAD ELECTIONS IN THE HAJIMENA VILLAGE, NATAR DISTRICT, REGENCY LAMPUNG SOUTH

By

MAYA YULIANTINA

One manifestation of political consciousness is political participation in village elections. Political participation based on the political awareness will encourage society to use their right to vote rationally and in accordance with the aspirations of the society. But in reality , the level of voter participation in the election of village heads is still lacking .The percentage of participate turnout was only 42% , which means there are still many voters who did not participate , reaching 58 % This study aimed to explain the influence of political consciousness toward political participation. The study was conducted using a survey conducted in seven hamlets in the Hajimena village, Natar District, regency Lampung South. This study uses a quantitative explanatory using technique by random sampling. Based on data analysis knowledge indicator is 29,3 % society know the political consciousness. The percentage of the society in indicator the understanding , 32,3 % of society do not understand the political consciousness , at the next level 43,4 % of the society enough to have an attitude of political awareness, and 48,4 % of the society do not have an action in the political consciousness. The resulting average value for political consciousness was 2.57 which is included in the low category. Percentages show that the society does not have a political consciousness , it can be considered that the political consciousness of the community in the village of Hajimena low. The political participation of the society in the village chief elections in 2015 in the village of Hajimena , District Natar , South Lampung regency majority of society answered 31,3 % so do not participate in political campaigns , play an active role and participate in the success election of heads of the village itself. and the resulting average value for political participation was 2.53 which included a lower category Percentages show that the public does not participate political , it can be considered that the political participation of the society in the village Hajimena low.

Keywords: Political Awareness, Political Participation, Village Head Election

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA HAJIMENA KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

MAYA YULIANTINA

Salah satu wujud dari kesadaran politik adalah partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun kenyataannya, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa masih kurang. Persentase partisipasi pemilih hanya mencapai 42%, yang berarti masih banyak pemilih yang tidak berpartisipasi yakni mencapai 58%. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik. Penelitian dilakukan dengan metode survei yang dilakukan pada tujuh dusun yang ada di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif eksplanatori dengan menggunakan teknik pengambilan sampel adalah *random sampling*. Berdasarkan analisis data indikator pengetahuan yakni 29,3% masyarakat mengetahui kesadaran politik. Persentase masyarakat dalam indikator pemahaman, 32,3% masyarakat tidak memahami kesadaran politik, di tingkatan selanjutnya 43,4% masyarakat cukup memiliki sikap kesadaran politik, lalu 48,4% masyarakat tidak mempunyai tindakan dalam kesadaran politik. Nilai rata-rata yang dihasilkan untuk kesadaran politik adalah 2,57 yang termasuk dalam kategori rendah. Dengan persentase yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran politik maka dapat dikategorikan bahwa kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimena rendah. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2015 di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mayoritas masyarakat menjawab 31,3% sangat tidak berpartisipasi politik dalam hal kampanye, berperan aktif dalam pemilihan kepala desa maupun ikut mensukseskan pemilihan kepala desa itu sendiri. Dan nilai rata-rata yang dihasilkan untuk partisipasi politik adalah 2,53 yang termasuk kategori rendah. Dengan persentase yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak ikut berpartisipasi politik maka dapat dikategorikan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Hajimena rendah.

Kata Kunci: Kesadaran Politik, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa

**PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
HAJIMENA KECAMATAN NATAR KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Oleh

MAYA YULIANTINA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

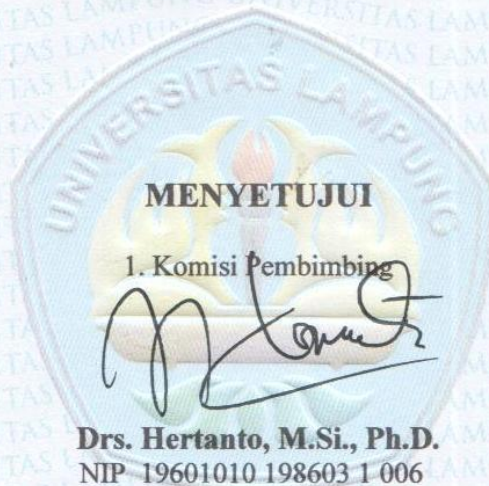
Judul Skripsi : **PENGARUH KESADARAN POLITIK TERHADAP
PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA DI DESA HAJIMENA KECAMATAN
NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Maya Yuliantina**

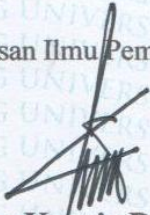
No. Pokok Mahasiswa : **1216021071**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



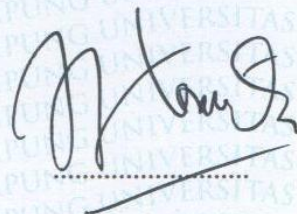
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



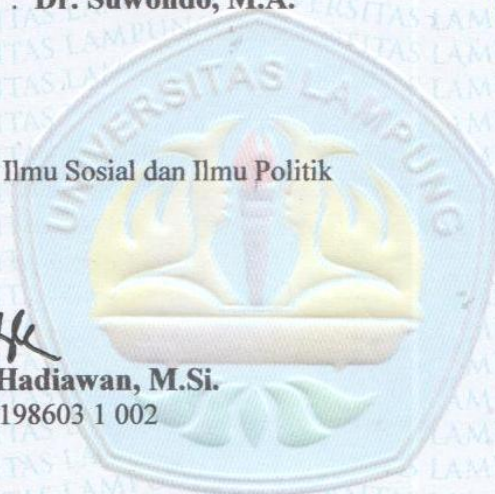
Penguji : **Dr. Suwondo, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian : **24 Agustus 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2016
Yang Membuat Pernyataan,



Maya Yuliantina
NPM. 1216021071

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Maya Yuliantina, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 13 Juli 1994. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Ahmad Yusuf dan Ibu Rohayah. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara.

Akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Universitas Lampung pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 2 Raja Basa Raya Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis diterima melalui jalur PMPAP.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
(Q.S Al Baqarah: 153)

Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah
(Ibnu Mas'ud)

**Orang yang berjiwa besar memiliki dua hati, yakni satu hati menangis
dan satu lagi bersabar
(Maya Yuliantina)**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

*Alhamduillahirabbil'alamiin, telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan*

*Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W.
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
Sebagaimana Suri Tauladan yang diajarkan Kepada Kita*

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

"Papa dan mama tercinta"

*Yang telah mendidik, membesarkan, selalu memberikan do'a terbaik dalam
sujudnya, memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi yang tiada henti
kepadaku hingga karya ini dapat terselesaikan.*

"Kakak-Kakakku"

*Ricky Ardiansyah dan Ade Andrian S.E
Terima kasih atas do'a serta semangat yang telah diberikan selama
menyelesaikan karya ini*

"Seluruh Keluarga Besariku"

*Yang senantiasa memberikan do'a dan
dukungan selama proses pendidikan berlangsung dan akhirnya menyelesaikan
karya sederhana ini.*

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya.

Penulisan skripsi berjudul “Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”, ini merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kesalahan atau kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar dapat bermanfaat di kemudian hari.

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, arahan, dukungan, nasehat, solusi dan motivasi selama proses bimbingan skripsi, terima kasih atas kesabaran yang diberikan selama membimbing penulis;
4. Bapak Dr. Suwondo, M.A., selaku Dosen Pembahas dan Penguji terima kasih telah memberikan kritik, saran, masukan, solusi dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Yana Ekana P.S., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi pengarah bagi Penulis, selama Penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih banyak untuk semua kata-kata khidmat yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

7. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Papa (Ahmad Yusuf), lelaki terhebat dihidupku yang mengajarkanku tentang banyak hal, tidak pernah lupa mengingatkan untuk selalu mengingat Allah SWT serta memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa. Terima kasih atas kasih sayang, doa, tetesan keringat dan air mata untuk kesabaran, keikhlasan dan semangat yang tiada henti untuk kesuksesan anak-anaknya.
9. Mama (Rohayah) wanita terhebat dihidupku yang membesarkanku, mendidik dan selalu mendoakan serta mempunyai rasa cinta yang tulus luar biasa. Mama adalah wanita yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesahku. Terima kasih atas segala semua pengorbanan yang telah mama lakukan untukku, serta doa yang tidak pernah putus untuk kesuksesan anak-anaknya. Semoga ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi individu yang lebih baik dan bisa membanggakan.
10. Kakak-kakakku Ricky Ardiansyah dan Ade Andrian S.E Terima kasih atas do'a serta semangat yang telah diberikan selama menyelesaikan karya ini.
11. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama proses pendidikan berlangsung hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku seperjuangan Nasira, Eri Rosalia Pratiwi, Fitria Zainubi Eka Putri, Rizka Fajrianti, dan Lintang Yunita Afriana Terimakasih untuk kebersamaan dan canda tawa yang pernah mengisi keseharian Penulis selama Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Semoga silaturahmi tetap terjalin.

13. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan Rahmaulia, Retno Triastika, Menik Ambarwati Muhtar, Dwi Respita Ningsih, Eka Nur Dwi Farini, Heliya Oktika Putri, Sari Ulfa dan Wahyu Eka Safitri Terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat yang tidak kenal waktu mendengarkan semua curahan hati.
14. Teman-teman KKN Tiyuh Mercuru Buana, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Nopiani, Dedi Yuliansyah, Rizki Abdi Darmawan dan Ekanto Wahyudi) Terimakasih untuk pengalaman, dan kebersamaan yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga silaturahmi tetap terjalin.
15. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2012 (Yoga, kety, ari, arum, dita, suci, baihaki, bagas, nando, dwi, bakti, guntur, mutiara, rizki pranata, wahid, nugraha, surya, saiful, yessy, ananda, ayu, budi, desti, dedek, evan, juanda dan semua) serta adik-adik dan kakak-kakak Jurusan Ilmu Pemerintahan. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
16. Ferdi Juliansyah, yang selalu memberikan motivasi, saran, doa serta senantiasa mendengarkan keluh kesahku dan selalu memberikanku semangat yang luar biasa dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaanya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2016

Maya Yuliantina

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengaruh	15
1. Definisi Pengaruh	15
B. Konsep Kesadaran Politik	16
1. Definisi Kesadaran Politik.....	16
2. Unsur-Unsur Kesadaran Politik	17
3. Cara-Cara untuk Mencapai Kesadaran Politik	19
4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Politik	19
5. Indikator Kesadaran Politik	20
C. Konsep Partisipasi Politik.....	23
1. Definisi Partisipasi Politik.....	23
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi politik.....	25
3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik	30
D. Konsep Pemilihan Kepala Desa	36
1. Definisi Tentang Desa	36
2. Definisi Kepala Desa	37
3. Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa.....	37
4. Syarat-syarat yang dapat memilih Kepala Desa	39
5. Tata cara pemilihan Kepala Desa	40
E. Kerangka Pikir	44
F. Hipotesis	47

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Definisi Konseptual	50
C. Definisi Operasional	52
D. Lokasi Penelitian	54
E. Populasi dan Sampel.....	55
F. Jenis Data	58
G. Teknik Pengumpulan Data	60
H. Teknik Pengolahan Data	60
I. Teknik Penentuan Skor.....	62
J. Teknik Pengujian Instrumen Penelitian.....	64
K. Teknik Analisis Data	69
L. Uji Hipotesis	70

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah dan Asal Usul Desa Hajimena	73
B. Keterangan Demografi Desa Hajimena	76
C. Komposisi Penduduk Desa Hajimena	80
D. Penggunaan dan Penguasaan Lahan Desa Hajimena.....	85
E. Sarana Transportasi Desa Hajimena.....	87
F. Visi dan Misi Desa Hajimena	87
G. Struktur Organisasi Desa Hajimena.....	89

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	90
B. Karakteristik Responden Berdasarkan Identitas Responden	90
C. Karakteristik Responden Berdasarkan Variabel X	94
D. Karakteristik Responden Berdasarkan Variabel Y	129
E. Analisis Data Berdasarkan Variabel	141
F. Teknik Analisis Data	161
G. Pembahasan	167

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	178
B. Saran	180

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Referensi Penelitian Terdahulu	6
2. Data Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu	9
3. Jumlah Pemilih dalam Pilkades di Desa Hajimena	10
4. Beberapa Definisi Partisipasi Politik	35
5. Variabel dan Indikator	53
6. Jumlah Sampel Desa Hajimena	57
7. Uji Validitas Variabel X Kesadaran Politik.....	65
8. Uji Validitas Variabel Y Partisipasi Politik	66
9. Nilai Koefisien Korelasi	67
10. Uji Reliabilitas Variabel X Kesadaran Politik.....	68
11. Uji Reliabilitas Variabel Y Partisipasi Politik.....	68
12. Daftar Nama-Nama Pejabat Kepala Desa Hajimena	75
13. Jumlah Sekolah atau Sarana Pendidikan Desa Hajimena.....	77
14. Sarana Keamanan Lingkungan	79
15. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	80
16. Komposisi Penduduk Menurut Suku/Ras.....	81
17. Komposisi Penduduk Menurut Agama.....	82
18. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian	83
19. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	84
20. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya.....	86
21. Identitas Responden Menurut Umur	91
22. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin	91
23. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	92
24. Identitas Responden Menurut Pekerjaan	93
25. Respon Pernyataan Mengetahui Pilkades yang dilaksanakan Tahun 2015	94
26. Respon Pernyataan Merasa Berhak Berpartisipasi dalam Pilkades..	96
27. Respon Pernyataan Memahami Pentingnya Pilkades.....	99
28. Respon Pernyataan Seberapa Dekat Masyarakat dengan Calon Kepala Desa	101
29. Respon Pernyataan Masyarakat Mengetahui Calon Kades Berasal dari Penduduk Setempat	103
30. Respon Pernyataan Masyarakat Setuju Calon Kades harus Berasal dari Putra Desa.....	105
31. Respon Pernyataan Visi dan Misi Calon Kades Memengaruhi Pilihan Masyarakat dalam Pilkades	107

32. Respon Pernyataan Popularitas Calon Kades Memengaruhi Pilihan Masyarakat dalam Pilkades	110
33. Respon Pernyataan Etnis/Suku Calon Kades Memengaruhi Pilihan Masyarakat dalam Pilkades	112
34. Respon Pernyataan Masyarakat Mengikuti Persiapan Pilkades	115
35. Respon Pernyataan Masyarakat Memiliki Sikap Pemilih	117
36. Respon Pernyataan Masyarakat akan Mengurus jika Tidak Terdaftar dalam DPS	119
37. Respon Pernyataan Ketokohan/Figur Calon Kades Memengaruhi Pilihan Masyarakat dalam Pilkades	122
38. Respon Pernyataan Masyarakat Mengetahui Keluarga Lain yang tidak Ikut dalam Pilkades.....	124
39. Respon Pernyataan Seberapa Besar Pengaruh Keluarga dalam Menentukan Pilihan pada Pilkades	126
40. Respon Pernyataan Masyarakat Ikut Mensukseskan Pelaksanaan Pilkades di Desa Hajimena	129
41. Respon Pernyataan Masyarakat Ikut Berpartisipasi	132
42. Respon Pernyataan Masyarakat Ikut Menciptakan Situasi yang Kondusif dalam Pilkades	134
43. Respon Pernyataan Masyarakat Mengikuti Kampanye	136
44. Respon Pernyataan Masyarakat Ikut Berperan Aktif	139
45. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel X Kesadaran Politik Indikator Pengetahuan	142
46. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel X Kesadaran Politik Indikator Pemahaman	145
47. Distribusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel X Kesadaran Politik Indikator Sikap.....	147
48. Distibusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel X Kesadaran Politik Indikator Tindakan.....	149
49. Distribusi Frekuensi Kumulatif Variabel X Kesadaran Politik	151
50. Distribusi Kumulatif Variabel X Kesadaran Politik	152
51. Distibusi Frekuensi Jumlah Skor Variabel Y Partisipasi Politik	156
52. Distibusi Kumulatif Variabel Y Partisipasi Politik.....	157
53. Hasil Analisis Regresi.....	163
54. Koefisien Determinasi	164
55. Hasil Statistik Uji T	165
56. Hasil Statistik Uji F	167
57. Hasil Persentase Indikator Pengetahuan Kesadaran Politik	168
58. Hasil Persentase Indikator Pemahaman Kesadaran Politik	169
59. Hasil Persentase Indikator Sikap Kesadaran Politik.....	169
60. Hasil Persentase Indikator Tindakan Kesadaran Politik.....	170
61. Distibusi Kumulatif Variabel X Kesadaran Politik	171
62. Hasil Persentase Partisipasi Politik.....	173
63. Distibusi Kumulatif Variabel Y Partisipasi Politik	174

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	46
2. One Sample Kolmogrov-Smirnov Test.....	162

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi rakyat memberikan kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Abdulkarim (2007: 15), pemerintah yang berpegang pada demokrasi merupakan pemerintah yang dipegang oleh rakyat atau setidaknya diikutsertakan dalam pembuatan suatu keputusan politik, pemerintahan atau kenegaraan.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi politik memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain.

Paska pemilihan presiden 2014 secara langsung, wacana dan kehendak publik untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia makin menguat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) baru Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka pilkada

langsung dapat dilaksanakan karena payung hukum bagi sistem pilkada langsung secara legal formal telah dibuat.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, semakin jelas bahwa proses transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia sejak reformasi 1998 cukup menemukan jalan terang guna membangun kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang lebih baik. Begitu juga halnya dengan berbagai proses pilkada di berbagai daerah di Indonesia yang selama ini telah berlangsung.

Pemilu terkecil dalam suatu daerah pedesaan yaitu Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa.

Pemilihan kepala desa adalah sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Sifat demokratis harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata, karena sendi-sendi kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya pembangunan desa, akan tetapi pembangunan desa memerlukan dukungan dari masyarakat.

Menurut Wasistiono (2006: 32) tentang pemilihan kepala desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa dilakukan dalam enam tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

Pengetahuan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa. Karena, sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa.

Wujud dari kesadaran politik salah satu bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Maka dari itu terciptalah *social control* yang berasal dari *people power* yang cerdas dan bermoral. Dari masyarakat seperti ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil, dan beradab.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Pengalaman pemilihan kepala desa yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran politik dan kepercayaan sangat rendah maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Tabel 1. Referensi Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Rahmanto (2012)	Partisipasi Masyarakat Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur	Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu: Metode Pengumpulan data, Penggalan data, dan metode pengamatan. Dokumen yang digunakan untuk memperoleh data tekstual tentang fenomena atau kejadian yang telah berlalu, antara lain: Dokumen tentang pilihan Kepala Desa Talun 2012.	Kasus-kasus yang dianalisa adalah yang dianggap mampu mewakili penjelasan partisipasi masyarakat dalam pilihan Kepala Desa 2012 di Desa Talun. Temuan penelitian bahwa partisipasi masyarakat pemilih dipengaruhi tiga faktor yaitu : figur, uang, dan tim sukses.
Theofilus Kuhon (2012)	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa	Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: Apakah yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara dalam proses pemilihan kepala desa? Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang ingin mendapat gambaran secara utuh rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan kepala desa.	Hal yang menarik adalah bahwa alasan mereka untuk tidak aktif dalam pilkades di Tonsealama pada umumnya bahwa sudah ada lembaga yang mengurus masalah pilkades tersebut, ada juga alasan bahwa masalah pilkades di Tonsealama ini menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Artinya ketika informan tidak terlibat secara aktif dalam pemilihan kepala desa, informan beranggapan ada bagian masyarakat lain yang sudah mengurus kegiatan tersebut, dan menganggap sudah gugur tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih adalah faktor sosial ekonomi, faktor psikologis, kepercayaan politik, dan sistem politik.

Moh. Ainul Yakin (2013)	Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013	Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan variabel adalah partisipasi politik. Populasi yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah keseluruhan pemilih di Desa Lembung sejumlah 982 pemilih dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 pemilih (10%) dan menggunakan metode pengumpulan data berupa angket, wawancara dan observasi.	Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu pemilihan kepala desa di Desa Lembung tingkat partisipasi masyarakat tergolong dalam partisipasi aktif, karena kesadaran politik kepada pemerintah sangat tinggi dalam memberikan dukungan melalui pemilihan kepala desa. Tingkat partisipasi masyarakat desa Lembung dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2013 sangat tinggi yaitu 98,2% masyarakat telah menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala desa. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Lembung karena adanya agen-agen sosialisasi politik dalam pelaksanaan tersebut sehingga kesadaran dalam memilih calon kepala desa sangat tinggi karena masyarakat ingin mencari sosok pemimpin demi perubahan-perubahan yang ada di desa tersebut.
-------------------------	--	--	---

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2016

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sehingga mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimena terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa tahun 2015. Kesadaran politik masyarakat dapat dilihat dari pengetahuan dan

pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. Selain itu dapat dilihat juga dari sikap dan tindakan politik yang ditunjukkan oleh masyarakat pada pilkades tahun 2015.

Menurut Budiardjo (2008: 369) menyatakan bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun kenyataannya, tingkat partisipasi pemilih masih kurang. Persentase partisipasi pemilih hanya mencapai 63% sampai 74%, yang berarti masih banyak pemilih yang tidak berpartisipasi yakni mencapai angka 30%. Berdasarkan data pada Tabel 2 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Lampung Selatan pada tahun 2010 mengalami penurunan, yakni dengan persentase 73% jika dibandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2009 yakni 75% dan pemilu presiden dan wakil presiden yakni 77%.

Tabel 2. Data Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu.

No	Kab/kota	Pilgub 2008	Pileg 2009	Pilpres 2009	Pilkada 2010	Pilkada 2011	Hasil %
1	2	3	4	5	6		7
1	Bandar Lampung	58%	66%	71%	57%	-	63%
2	Metro	63%	73%	75%	71%	-	70.5 %
3	Tanggamus	63%	72%	73%	-	-	69.3 %
4	Way Kanan	70%	78%	75%	76%	-	75.7 %
5	Lampung Timur	66%	75%	76%	71%	-	72%
6	Lampung Barat	61%	76%	75%	-	-	-
7	Lampung Tengah	65%	73%	75%	68%	-	70.6 %
8	Lampung Selatan	67%	75%	77%	73%	-	73%
9	Pesawaran	70%	-	79%	72%	-	73.6 %
10	Tulang Bawang	65%	80%	75%	-	-	73.3 %
11	Lampung Utara	70%	75%	75%	-	-	73.3 %
12	Pringsewu	-	-	-	-	70.54%	-
13	Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	84.80%	-
14	Mesuji	-	-	-	-	78.79%	-
	Jumlah	65.2%	74.3%	75%	69.7%	78.04%	71%

Sumber data: kpu-d-provlampung.go.id

Jika melihat jumlah pemilih pada pemilihan kepala desa tahun 2015 bulan juli, menurut Joko Raharjo, panitia pemilihan mengatakan jumlah pemilih dalam pilkades kali ini 4.457. Sedangkan warga yang tidak hadir/ tidak memilih 6.068. Itu berarti hanya 42% tingkat partisipasi politik masyarakat yang memilih dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan ada 58% masyarakat yang tidak hadir/ tidak memilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena pada bulan juli tahun 2015.

Tabel 3. Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015

Masyarakat yang memilih	Masyarakat yang tidak memilih
4.457	6.068
42%	58%

Sumber: Diolah oleh penulis tahun 2015

Pada tanggal 6 Juli 2015 telah diselenggarakan pemilihan kepala desa Hajimena di TPS Gang Abdul Karim, Jalan Pulau Sebiay, desa setempat. Dimana yang terpilih menjadi kepala desa di Desa Hajimena adalah Rais Yusuf yakni dengan perolehan suara 1.731, disusul Bahti Idris yaitu 1.699, kemudian Arita Ahyar dengan 475 suara, Sumardiono dengan 300 suara, Heri Wahyudi 212 suara dan 54 surat suara dinyatakan rusak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut peneliti penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam penelitian akan mengungkapkan bagaimana pengaruh kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimena terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa tahun 2015. Adakah pengaruh kesadaran politik yang tinggi akan memunculkan partisipasi politik yang tinggi atau sebaliknya kesadaran politik yang rendah akan memunculkan partisipasi politik yang rendah pula. Atau justru dengan adanya kesadaran politik yang tinggi memunculkan partisipasi politik masyarakat rendah dalam pilkades tahun 2015.

Rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala desa di semua wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya

partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak ikut memilih, berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh.

Pengamat dan penyelenggara pemilu memang kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih, tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil riset. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin masyarakat tersebut melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dalam pilkades bukan disebabkan karena sistem pilkades yang tidak demokratis.

Rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak selalu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini. Setiap wilayah maupun periode pemilihan kepala desa selalu ditemukan keunikannya masing-masing, secara umum pemilihan kepala desa sangat kental akan kedekatan emosi karena pemilih mengenal betul orang-orang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa, juga didukung adanya

hubungan kekerabatan, dan persaingan yang tajam antar tim sukses calon kepala desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa tahun 2015 di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
3. Apakah ada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
2. Mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa tahun 2015 di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
3. Mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan politik.

2. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi Pemerintah Daerah khususnya kepala desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan kepala desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran partisipasi politik masyarakat desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan serta untuk memberikan kontribusi seberapa jauh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengaruh

1. Definisi Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 879) pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Dari pengertian di atas telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.

Menurut Poerwardarminta (1983: 731) menyatakan bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.

Menurut Badudu dan Zain (1994: 1031) pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi; sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; dan tunduk atau mengikuti karena kuasa dan kekuatan orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada timbul dari suatu hal yang dapat membentuk dan mengubah sesuatu yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

B. Konsep Kesadaran Politik

1. Definisi Kesadaran Politik

Menurut Naning (1982: 64) kesadaran adalah suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap sesuatu hal, sedangkan politik adalah segala hal ikhwal tentang negara. Jadi kesadaran politik adalah berarti suatu kondisi psikologis yang tanggap terhadap segala hal ikhwal negara. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik berarti tanggap terhadap segala hal ikhwal kenegaraan.

Menurut Ruslan (2000: 94) kesadaran politik merupakan berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik.

Menurut Surbakti (2007: 144), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Budiardjo (1985: 22) mengatakan bahwa tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

Menurut Budiyanto (2006: 185), kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan *urgensi* urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai.

Dari beberapa pengertian kesadaran politik dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya.

2. Unsur-unsur Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000: 417) di dalam kesadaran politik mencakup unsur-unsur yang meliputi antaranya yaitu:

- a. Kesadaran islam yaitu tentang konsepsi secara benar dan menyeluruh yang dengannya seorang individu mampu menyikapi realita yang terjadi dengan segala aspek-aspeknya sesuai pandangan intelektual yang telah terbentuk pada dirinya. Dalam hal ini kesadaran didasarkan pada pandangan hidup seseorang dengan kata lain sesuai dengan keyakinan setiap orang. Jadi, pada dasarnya kesadaran islam dalam pengertian ini yaitu kesadaran dalam konsep islam, namun demikian bukan berarti seseorang

selain agama islam tidak berarti tidak memiliki kesadaran politik, karena hal tersebut didasarkan pada keyakinan pandangan hidup masing-masing.

- b. Kesadaran gerakan yaitu kesadaran untuk membentuk organisasi atau gerakan yang bekerja guna mewujudkan cita-cita bersama, tergabung dan terlibat di sana dengan berupaya memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan organisasi atau gerakan tersebut.
- c. Kesadaran akan problematika politik yang terjadi di masyarakatnya, meliputi kesadaran akan masalah, hukum islam, kebebasan dan keterjajahan, kebebasan politik, masalah persatuan dan sebagainya.
- d. Kesadaran akan hakikat sikap politik yaitu kesadaran akan substansi sekitar sikap politik dimana individu menjadi sadar akan peristiwa atau masalah politik itu sendiri. Termasuk di antaranya adalah mempelajari masalah-masalah politik umum, mempelajari arus politik dan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dan menentukan sikap terhadapnya, dan memonitor peristiwa-peristiwa politik yang sedang berkembang.

3. Cara-cara untuk mencapai kesadaran politik

Menurut Ruslan (2000: 96) ada beberapa cara dalam mencapai kesadaran politik yang melalui beberapa hal yaitu:

- a. Arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pengajaran pendidikan politik langsung, yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin politik.
- b. Pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik.
- c. Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri. Misalnya membaca koran dan buku-buku tentang politik, serta mengikuti berbagai peristiwa.
- d. Kesadaran yang lahir melalui dialog-dialog kritis.
- e. Ditambah dengan kesadaran politik yang merupakan hasil dari dua metode, yaitu *apprenticeship* dan generalisasi. Maka seluruh metode ini akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesadaran politik.

4. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik

Menurut Ruslan (2000: 97-98) kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang memengaruhi kesadaran politik yang terpenting di antaranya adalah:

- a. Jenis kultur politik di mana individu itu tumbuh darinya atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya.
- b. Berbagai revolusi dan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat.
- c. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya.
- d. Adanya pemimpin politik/sejumlah tokoh politik yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat luas.

5. Indikator Kesadaran Politik

Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

Menurut Notoatmodjo (2003: 121) pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

Menurut Arman (2002: 427) pemahaman adalah sesuatu hal yang seseorang pahami dan mengerti dengan benar, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara memelajari sesuatu dengan baik supaya paham, dan memiliki pengetahuan. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dari itu pengetahuan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa. Karena, sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik.

Menurut Notoatmodjo (2003: 124) mengemukakan bahwa sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. Dan merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Sikap adalah kesiediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap suatu objek. Sedangkan tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala

desa karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Kesadaran politik atau keinsyafan bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat akan banyak tugas negara yang terbengkalai.

Menurut Surbakti (2007: 144) menyebutkan aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.

Menurut Wardhani (2008: 8) bahwa tingkat kesadaran dapat dibagi menjadi 4 yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan). Kesadaran politik yang rendah dapat dilihat apabila berada pada level pengetahuan dan pemahaman, sedang pada level sikap, dan tinggi pada level pola perilaku/tindakan.

C. Konsep Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata *part* yang berarti bagian. Jika kata *part* dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi *to participate*, yang bermakna turut ambil bagian.

Menurut Damsar (2010: 10) politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota, negara kota. Dari polis berkembang konsep *polites* yang bermakna warga negara dan konsep *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Dari penjelasan etimologis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga negara pada suatu (negara) kota. Sedangkan akar katanya dari bahasa Inggris adalah *politics*, yang bermakna bijaksana. Maka dari itu politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga negara dalam negara (kota).

Menurut Budiardjo (1982: 1) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat

umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Menurut Surbakti (1992: 140) mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Sedangkan Rush dan Althop (2000: 123) berpendapat tentang partisipasi politik yakni keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan partisipasi politik, seperti pemilihan umum, penyampaian pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta partisipasi melalui masyarakat di lingkungan keluarga dan kemasyarakatan.

Partisipasi dilakukan menurut kemampuan, kesiapan, dan kesempatan masing-masing. Setiap warga negara perlu mempersiapkan diri agar mampu berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang ada. Partisipasi politik bukanlah dominasi setiap warga negara. Partisipasi politik berhaluan kepada kehendak untuk memengaruhi pemerintah yang sedang berkuasa.

Menurut Sastroatmodjo (1995: 68) yang menyatakan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Dengan demikian terdapat penjelasan tentang siapa yang berpartisipasi secara jelas, prosesnya

dan tujuan partisipasi tersebut. Subyek pokoknya ialah warga negara. Prosesnya adalah memengaruhi kondisi yang sedang terjadi dalam pemerintah. Tujuannya ialah memengaruhi keputusan pemerintah.

Partisipasi politik bertujuan untuk memengaruhi mekanisme pemerintahan, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik untuk mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan kearah tujuan dengan stabil dan sukses.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, diketahui bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga masyarakat dalam berbagai struktur masyarakat baik disadari atau pun tidak untuk memengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan pemerintah, serta sebagai mekanisme kontrol bagi berlangsungnya dan hidupnya sistem politik.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Pada umumnya partisipasi politik dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan ataupun kesadaran dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik yang ada di lingkungannya. Dari sini akan ditentukan pula berbagai tipe atau bentuk partisipasi dalam masyarakat.

Menurut Alfian (1986: 225-277) mengemukakan empat macam partisipasi politik: pertama, kalau pengetahuan/kesadaran politik masyarakat tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik juga tinggi, maka masyarakat akan berpartisipasi secara aktif. Partisipasi masyarakat sehat karena mereka loyal dan mendukung sistem politik.

Kedua, partisipasi politik terjadi kalau pengetahuan/kesadaran politik yang tinggi diikuti oleh kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik yang berlaku. Suasana ini mengundang adanya sikap dan tingkah laku yang tampak membangkang, disertai sikap kurang atau tidak responsif dari masyarakat yang berkuasa dalam sistem politik itu. Ketiga, terjadi jika pengetahuan/kesadaran yang rendah berkaitan dengan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem politik. Dalam suasana seperti itu, masyarakat memang tidak aktif berpolitik.

Keempat, muncul bilamana pengetahuan/kesadaran politik yang rendah berkaitan dengan kepercayaan yang rendah pula terhadap sistem politik. Dalam hal ini, walaupun masyarakat bersikap pasif, namun dalam kepasifannya itu masyarakat tertekan, terutama oleh karena perlakuan yang masyarakat anggap sewenang-wenang dari penguasa. Dari pendapat itu diketahui adanya empat tipe partisipasi, yaitu partisipasi politik aktif, membangkang, tradisional, dan pasif.

Menurut Budiyanto (2006: 181) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara, dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal maupun ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik:

a. Konvensional

1. Pemberian suara (*votting*);
2. Diskusi politik;
3. Kegiatan kampanye;
4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan; dan
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik administrasi.

b. Non-Konvensional

1. Pengajuan petisi;
2. Berdemonstrasi;
3. Konfrontasi;
4. Mogok;
5. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman, dan pembakaran; dan
6. Tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, dan perang gerilya revolusi.

Dari uraian pendapat di atas, berbagai bentuk partisipasi politik terbagi dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat serta respon atau tanggapan setiap individu tersebut terhadap

politik. Tetapi hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa bentuk partisipasi politik itu dapat dibedakan dalam bentuk yang aktif dan yang pasif.

Adapun bentuk yang aktif antara lain: partisipasi melalui organisasi politik atau kemasyarakatan yang ada, rapat umum atau demonstrasi, penyaluran melalui media massa, pemberian suara dan serta diskusi politik termasuk juga di dalamnya ialah tindak kekerasan politik. Sedangkan yang termasuk dalam partisipasi politik pasif di antaranya ialah aliensi dan apatisisme terhadap politik. Jika seolah-olah dalam sikap apatisisme politik seseorang atau individu tidak terlibat dalam suatu proses politik. Tetapi dari sikapnya itu cukup diketahui bahwa sesungguhnya individu memiliki penilaian tersendiri terhadap politik. Sehingga sikapnya itu dapat dianggap sebagai partisipasi politik dalam bentuk lain.

Menurut Huntington dan Nelson (1994: 16-17) menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda, yaitu:

- a. Kegiatan pemilihan;
- b. *Lobbying*;
- c. Kegiatan organisasi;
- d. Mencari koneksi (*contacting*);
- e. Tindak kekerasan (*violence*).

Dalam penelitian ini, salah satu bentuk partisipasi politik yang digunakan adalah kegiatan pemilihan atau dalam hal ini adalah kegiatan pilkades tahun 2015. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Dimana menurut Huntington dan Nelson (1994), kegiatan pemilihan mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.

Menurut Surbakti (2007: 144) membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam empat macam, yaitu:

a. Partisipasi Aktif

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.

b. Partisipasi Militan-Radikal

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik

tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

c. Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak memersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

d. Partisipasi Apatis

Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatitis).

3. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik

Menurut Cholisin dan Nasiwan (2012: 149) menyatakan bahwa apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasinya cenderung aktif.

Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif.

Berdasarkan teori Paige, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif. Dengan tidak memiliki kesadaran politik dan tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah maka masyarakat cenderung tidak mau ikut berpartisipasi politik. Karena tidak ada lagi rasa ingin mengetahui isu-isu politik dan tidak ada rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang partisipasi politik adalah berdasarkan faktor kesadaran politik. Kesadaran politik menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai.

Negara berkembang khususnya Indonesia, masyarakat yang hidup di pedesaan jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat perkotaan, menuntut penanganan sungguh-sungguh dan aparat pemerintah atau penguasa setempat. Masyarakat pedesaan yang secara kuantitatif jauh lebih besar memiliki kesadaran politik yang minim sehingga berdampak pada kehidupan politik nasional. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap kemajuan perkembangan nasional di segala bidang.

Menurut Budiyanto (2006: 185) antara lain menyatakan sekalipun sudah bangkit kesadaran nasional dan meningkatnya aktivitas kehidupan politik di tingkat pedesaan, namun masyarakat tani masih belum terkait secara aktif kepada pemerintah nasional dalam hubungan timbal balik yang aktif dan responsif. Hubungan yang ada baru bersifat berat sebelah, yaitu dari atas ke bawah.

Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Dengan demikian sesungguhnya kegiatan-kegiatan pendidikan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan perlu terus didorong dan ditingkatkan demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Sementara itu menurut Rahman (2007: 286), dipahami adanya partisipasi politik yang luas yaitu: modernisasi, perubahan struktur strata sosial, pengaruh intelektual, konflik dan intervensi yang kuat dan luas. Penjelasan dari lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Modernisasi, kemajuan dalam segala bidang kehidupan menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru dan masyarakat sering berkembangnya modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elit maka yang di cari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas antara para pesaing politik maka kelompok-kelompok politik mencari strategi untuk meraih dukungan masa.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktifitas pemerintah sering menyebabkan timbulnya tuntutan-tuntunan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam

artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Berikut ini adalah beberapa defenisi partisipasi politik menurut para ahli juga disertai indikator-indikator partisipasi politik yang disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Beberapa Definisi Partisipasi Politik

Sarjana	Defenisi	Indikator
Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson (1984: 5)	Partisipasi politik...kegiatan warga preman (<i>private citizen</i>) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.	Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan; Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik; dan Dilakukan warga negara preman (biasa).
Michael Rush & Philip Althoff (2003: 23)	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik dan Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.
Herbert Mc Closky dalam Miriam (1994:183-184)	Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (<i>voluntary</i>) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.	Warga negara terlibat dalam proses politik.
Miriam Budiarmo (1994: 183)	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (<i>public policy</i>).	Berupa kegiatan individu atau kelompok dan Bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik.
Ramlan Surbakti (1992: 140-141)	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. ... sesuai dengan istilah partisipasi, (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.	Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan Dilakukan oleh warga negara biasa.

Sumber: Gatara, Said A.A & Said, Dzulkiah Moh (2007)

Berdasarkan pendapat para ahli pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

D. Konsep Pemilihan Kepala Desa

1. Definisi Tentang Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.

2. Definisi Kepala Desa

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa memiliki masa jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan menjabat paling lama tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

3. Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa

Perkembangannya pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dijelaskan dalam Pasal 32 bahwasannya persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala desa sebagai berikut:

- a. Warga negara republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.

4. Syarat-syarat yang dapat memilih Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dalam pasal 35 hanya dijelaskan bahwasannya Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pasal 39 menyebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. Berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

5. Tata Cara pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBDesa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pasal 25 menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan

Pada pasal 28 disebutkan bahwa tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf (a), terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan enam bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu sepuluh hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diajukan oleh panitia.

Pencalonan dijelaskan pada pasal 31 yakni tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf (b) terdiri atas kegiatan:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu sembilan hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu dua puluh hari;
- c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling sedikit dua orang dan paling banyak lima orang calon;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu tiga hari; dan
- f. Masa tenang dalam jangka waktu tiga hari.

Pasal 56 menyebutkan bahwa tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:

- a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara; dan/atau
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 57 menyebutkan bahwa:

- a. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- b. Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu dalam surat suara.

Pasal 69 menyebutkan bahwa tahapan penetapan calon terpilih terdiri atas kegiatan:

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 71 menyebutkan bahwa:

- a. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan keputusan Bupati, maka kepala desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati;
- b. Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan)”, Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan memertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- c. Tempat dan waktu pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh panitia pemilihan Kabupaten; dan
- d. Tata cara pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

E. Kerangka Pikir

Menurut Budiyanto (2006: 185), kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan *urgensi* urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai. Maka dari itu kesadaran politik dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya untuk dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapinya.

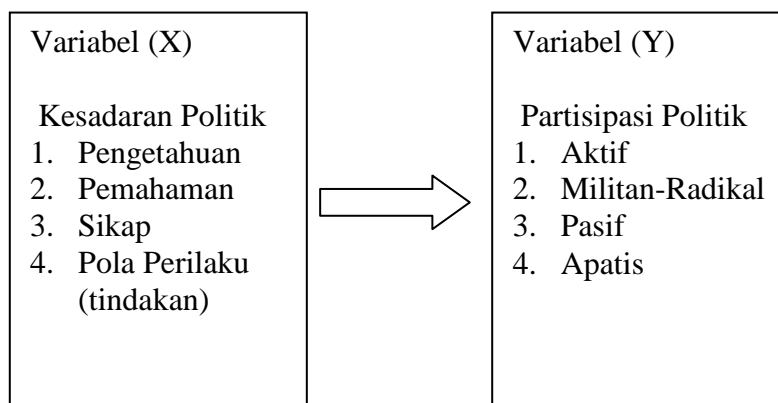
Menurut Ramlan Surbakti (1992: 140) mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Sedangkan Rush dan Althop (2000: 123) berpendapat tentang partisipasi politik yakni keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan partisipasi politik, seperti pemilihan umum, penyampaian

pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta partisipasi melalui masyarakat di lingkungan keluarga dan kemasyarakatan.

Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

Pengetahuan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa. Karena, sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala desa karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa.

Untuk mengetahui gambaran bagaimana pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan akan disajikan dalam bagan/gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan penjelasan bagan kerangka pikir di atas, maka dapat diketahui dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkapkan sejauh mana pengaruh kesadaran politik memengaruhi partisipasi politik masyarakat di Desa Hajimena dalam pemilihan kepala desa tahun 2015.

Penelitian ini akan mengungkapkan pengaruh kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimena yang merupakan unsur penting sebagai salah satu penunjang partisipasi politik dan demokratisasi. Dengan memiliki kesadaran berpolitik maka masyarakat tidak mudah tertipu oleh janji politik atau iming-iming yang lain. Politik jangan dipandang sebagai sesuatu yang elit, atau bahkan dipandang negatif sebagai alat peraih kekuasaan. Justru dengan memiliki kesadaran berpolitik, masyarakat mampu berpolitik dengan sehat dan ikut berpartisipasi secara aktif. Dan mengembangkan kesadaran berpolitik semenjak dini demi mencapai negara yang demokratis, adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan teori Paige, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif. Dengan tidak memiliki kesadaran politik dan tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah maka masyarakat cenderung tidak mau ikut berpartisipasi politik. Karena tidak ada lagi rasa ingin mengetahui isu-isu politik dan tidak ada rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

F. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011: 50) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris berdasarkan data lapangan. Dalam penelitian ini yang berjudul tentang Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan pendapat di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_o : Tidak ada Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

H_a : Ada Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

H_o diterima (H_a ditolak) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_o ditolak (H_a diterima) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dua variabel sehingga menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori, yang artinya penelitian yang menggunakan data yang sama dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Menurut Mardalis (2004: 26) Penelitian eksplanatori tidak hanya sekedar memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian yang ingin dijelaskan, tetapi juga bagaimana hubungannya dengan gejala sosial lainnya, dan mengapa hubungannya seperti itu. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesis yang menguji hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti.

Menurut Prasetyo (2005: 43) Pendapat lain juga menjelaskan bahwa metode eksplanatif dirancang untuk menemukan hubungan antara variabel

bebas dan variabel terikat kemudian data yang diperoleh diolah dan disusun sampai diperoleh kejelasan tentang hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Tujuan utama dalam penggunaan metode ini adalah untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa metode penelitian eksplanatif adalah penelitian yang mencari hubungan sebab akibat yang menggunakan variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian eksplanatif, dimana hubungan sebab yakni kesadaran politik akan menimbulkan partisipasi politik masyarakat.

Metode ini digunakan sebagai cara yang dilakukan oleh peneliti agar dapat menjelaskan secara lengkap mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari kesadaran politik terhadap partisipasi politik, sampel dari suatu populasi ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melalui pengujian hipotesa sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendefinisikan dan mengumpulkan fakta-fakta yang diteliti yaitu pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena. Penelitian ini akan menjelaskan makna hubungan (korelasi) antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas (kesadaran politik) dan

variabel terikat (partisipasi politik) secara lengkap dengan kajian akademik dan empirik yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan definisi konsep penelitian agar mempermudah penelitian ini dilakukan terkait masalah yang akan diteliti. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran Politik

Menurut Surbakti (2007: 144), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Budiardjo (1985: 22) mengatakan bahwa tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan).

2. Partisipasi Politik

Dalam penelitian ini, salah satu bentuk partisipasi politik yang digunakan adalah kegiatan pemilihan atau dalam hal ini adalah kegiatan pilkades tahun 2015. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Dimana menurut Huntington dan Nelson (1994), kegiatan pemilihan mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.

Menurut Surbakti (2007: 144) membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam empat macam, yaitu:

a. Partisipasi Aktif

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.

b. Partisipasi Militan-Radikal

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, partisipasi ini cenderung

mengutamakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

c. Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak memersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

d. Partisipasi Apatitis

Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatitis).

C. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2004: 31), definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti adalah:

Tabel 5. Variabel dan Indikator

No	Variabel	Indikator	Sub indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kesadaran Politik	Pengetahuan	Mengetahui arti pilkades
			Mengetahui adanya pilkades
			Mengetahui perda pilkades
			Mengetahui berhak berpartisipasi dalam pilkades
		Pemahaman	Memahami pentingnya pilkades
			Memahami pentingnya partisipasi dalam pilkades
			Memahami konsekuensi tidak berpartisipasi
			Memahami kewajiban warga negara
			Seberapa dekat dengan kandidat
			Memahami informasi kandidat
			Mengetahui hari pemungutan suara
		Sikap	Berperan aktif
			Ikut pada saat persiapan pilkades
			Ikut persiapan pada hari H
			Mengalami hambatan ketika pilkades
			Calon pilkades yang diunggulkan
			Faktor tidak memilih
Tidak terdaftar dalam pilkades			
Harapan masyarakat			
Sikap memilih atau tidak			
	Menggunakan hak pilih		

		Tindakan politik	Keluarga yang tidak memilih
			Keinginan dalam pilkades
			Pengaruh keluarga dalam pilkades
2	Partisipasi Politik	Aktif	Ikut kampanye
			Ikut berpartisipasi dalam pilkades
			Ikut menciptakan situasi yang kondusif
			Ikut berperan aktif dalam pilkades
			Ikut mensukseskan pilkades
		Militan-Radikal	Mengkritisi kepala desa yang menang
			Mengkritisi hasil pilkades
			Berdemonstrasi
		Pasif	Tidak mengetahui adanya pilkades
			Tidak mengetahui kandidat calon
			Tidak memahami kewajiban warga negara
		Apatif	Tidak berpartisipasi dalam pilkades
			Tidak mengikuti kampanye
			Tidak ikut mensukseskan pilkades
			Tidak berperan aktif dalam pilkades

Sumber : diolah oleh penulis tahun 2016

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang dilakukan pada masyarakat di setiap dusun Desa Hajimena Kecamatan Natar yaitu, Dusun I Induk Kampung, Dusun II Way Layap, Dusun III Sinar Jati, Dusun IV Perum Bataranila, Dusun V Perum Polri, Dusun VI Puri Sejahtera dan Dusun VII Sidorejo.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2007: 72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Siregar (2013: 30) populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi sangat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat mata pilih di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah total mata pilih yaitu 11.135 orang. Unit analisis dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa tersebut, dimana terbagi dalam tujuh dusun yaitu Dusun I Induk Kampung, Dusun II Way Layap, Dusun III Sinar Jati, Dusun IV Perum Bataranila, Dusun V Perum Polri, Dusun VI Puri Sejahtera, dan Dusun VII Sidorejo.

2. Sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik *random sampling*, yaitu agar setiap *sample* populasi dapat memiliki kesempatan atau peluang yang sama. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Teknik Solvin pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui dalam Siregar (2013: 34) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n: Banyaknya sampel

N: Jumlah populasi

d: Tarif nyata (0,10)

Maka dengan menggunakan rumus tersebut banyaknya sampel adalah:

$$n = \frac{11135}{11135 (0,10)^2 + 1} = 99,10 \text{ dibulatkan menjadi } 99 \text{ orang}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa responden yang akan diteliti adalah sebanyak 99 orang pada masyarakat Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *random sampling*, yang memberikan kesempatan sama kepada setiap

masyarakat untuk dijadikan sampel, yang diambil sebanding dengan banyaknya sub mata pilih di setiap dusun dengan rumus:

$$Nh = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan:

Nh : Banyaknya sampel dari setiap kelompok

n : Jumlah sampel yang mewakili populasi

Ni : Jumlah populasi masing-masing dusun

N : Jumlah populasi

Dusun di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan meliputi:

Tabel 6. Jumlah Sampel Desa Hajimena

Dusun	Rumus	Jumlah
I Induk Kampung	$Nh = \frac{2066}{11135} \times 99 = 18,36$	19 orang
II Way Layap	$Nh = \frac{1219}{11135} \times 99 = 10,83$	11 orang
III Sinar Jati	$Nh = \frac{1795}{11135} \times 99 = 15,95$	16 orang
IV Bataranila	$Nh = \frac{1698}{11135} \times 99 = 15,09$	15 orang
V Perum Polri	$Nh = \frac{1475}{11135} \times 99 = 13,11$	13 orang
VI Puri Sejahtera	$Nh = \frac{1374}{11135} \times 99 = 12,21$	12 orang
VII Sidorejo	$Nh = \frac{1508}{11135} \times 99 = 13,40$	13 orang

Total sampel pada Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah 99 orang. Setelah ditemukan penelitian dengan sampel sebanyak 99 orang dalam satu Desa Hajimena, penulis melakukan penelitian menentukan sampel dengan cara diundi. Penulis telah mendapatkan Data Pemilih Tetap (DPT) dengan nomor urut kelipatan 10, sehingga sampel ditemukan.

F. Jenis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data ini adalah responden yang diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kemudian dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi tambahan berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh hasil yang akurat sehingga data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik dari hasil kuesioner maupun wawancara kepada responden. Berdasarkan penjelasan di atas, maka data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian secara langsung. Menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang tinggal di Desa tersebut.

Pada penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer adalah masyarakat yang ada di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang mewakili setiap dusun di wilayah tersebut. Data primer dengan menggunakan kuesioner dengan menyebarkan secara acak kepada masyarakat yang berada di dusun-dusun Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini dipergunakan sebagai pendukung. Sumber data ini antara lain dokumentasi, undang-undang, buku-buku, koran, jurnal, majalah, arsip-arsip, dan informasi lainnya yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data sekunder, dalam penelitian ini peneliti memerlukan data-data berupa arsip kependudukan dari masyarakat Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga peneliti mengumpulkan data berupa arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip jumlah kependudukan Desa Hajimena dan arsip Monografi Desa Hajimena.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Menurut Koentjaraningrat (1977: 215) menyatakan bahwa kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau dalam sesuatu bidang. Kuesioner ini kemudian disebarakan kepada responden yaitu masyarakat di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk diisi atau dijawab kemudian setiap pertanyaan disediakan alternatif jawaban berjenjang dan setiap jenjang pertanyaan diberi skor yang tidak sama pada setiap jenjang jawabannya.

2. Dokumentasi

Teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku, undang-undang, arsip, data, surat kabar, jurnal, serta informasi lainnya yang diperoleh dari internet.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah mengadakan pengolahan data dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* 17. Menurut Siregar (2013: 86) pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam

memeroleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. *Editting* adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.
2. Koding adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis. Pemberian kode melalui program *Microsoft excel* sebelum memasukkannya ke dalam program *SPSS 17* yang berguna untuk memudahkan peneliti menginput data kedalam *SPSS 17*.
3. *Format Entry Data* di Program *SPSS 17* merupakan suatu proses pembuatan format pengerjaan data pada program *SPSS* sebelum nantinya data dimasukkan ke dalam komputer. Adapun yang digunakan yaitu untuk mengukur uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis, dan data hasil kuesioner penelitian.
4. Pemindahan data adalah memasukkan data yang telah didapat (berupa kode) ke dalam mesin pengolah data yaitu *SPSS 17*, sehingga nantinya didapatkan hasil dari pengolahan tersebut dalam bentuk tabel.
5. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang

dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.

6. Penyajian Data adalah suatu bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel, baik itu dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang nantinya dapat digunakan untuk penyajian data di dalam isi penelitian.

I. Teknik Penentuan Skor

Menurut Sugiyono (2005: 108) Setelah seluruh data yang diperoleh dalam penelitian diuraikan, maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan pembahasan data yang telah diuraikan tadi. Interpretasi data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari responden. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan. Adapun Penskoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan data tersebut adalah: Penskoran menggunakan penilaian sebagai berikut:

- a) Untuk alternatif jawaban a diberi skor 5
- b) Untuk alternatif jawaban b diberi skor 4
- c) Untuk alternatif jawaban c diberi skor 3
- d) Untuk alternatif jawaban d diberi skor 2
- e) Untuk alternatif jawaban e diberi skor 1

Kemudian untuk menentukan kategori jawaban responden terhadap masing-masing alternatif apakah tergolong sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah maka dapat ditentukan kelas intervalnya, dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{banyak bilangan}}$$

Maka diperoleh :

$$\frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden masing masing variabel yaitu :

- a) Untuk kategori skor sangat tinggi = 4,21- 5,00
- b) Untuk kategori skor tinggi = 3,41- 4,20
- c) Untuk kategori skor sedang = 2,61- 3,40
- d) Untuk kategori skor rendah = 1,81- 2,60
- e) Untuk kategori skor sangat rendah =1,00- 1,80

Untuk menentukan tergolong sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah maka jumlah jawaban responden akan ditentukan rata-ratanya dengan membagi jumlah pertanyaan dan hasil pembagian tersebut akan dapat diketahui jawaban responden termasuk kategori mana.

J. Teknik Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2002: 144), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu *instrument* yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.

Pengujian validitas ditujukan untuk melihat hubungan antar masing-masing item pertanyaan pada variabel bebas dan variabel terikat dengan pengujian sebanyak 99 kuesioner. Apabila ada satu pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, sebaiknya direvisi atau dihilangkan dari daftar pertanyaan sehingga terlihat konsistensi dari masing-masing item pertanyaan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Metode uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah metode korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Nilai Validitas

x = Jumlah skor item pertanyaan

y = Jumlah skor total pertanyaan

n = Jumlah sampel yang akan diuji

Kriteria putusan:

Validitas hitung $> r$ tabel maka valid atau sah

Validitas hitung $< r$ tabel maka tidak valid tidak sah.

Tabel 7. Uji Validitas Variabel X Kesadaran Politik

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kondisi	Hasil
Pernyataan 1	0,476822	0,1975	0,476822>0,1975	Valid
Pernyataan 2	0,239275	0,1975	0,239275>0,1975	Valid
Pernyataan 3	0,253927	0,1975	0,253927>0,1975	Valid
Pernyataan 4	0,371788	0,1975	0,371788>0,1975	Valid
Pernyataan 5	0,203997	0,1975	0,203997>0,1975	Valid
Pernyataan 6	0,260594	0,1975	0,260594>0,1975	Valid
Pernyataan 7	0,257894	0,1975	0,257894>0,1975	Valid
Pernyataan 8	0,244189	0,1975	0,244189>0,1975	Valid
Pernyataan 9	0,300316	0,1975	0,300316>0,1975	Valid
Pernyataan 10	0,285694	0,1975	0,285694>0,1975	Valid
Pernyataan 11	0,283226	0,1975	0,283226>0,1975	Valid
Pernyataan 12	0,371801	0,1975	0,371801>0,1975	Valid
Pernyataan 13	0,268069	0,1975	0,268069>0,1975	Valid
Pernyataan 14	0,400664	0,1975	0,400664>0,1975	Valid
Pernyataan 15	0,217017	0,1975	0,217017>0,1975	Valid
Pernyataan 16	0,339249	0,1975	0,339249>0,1975	Valid
Pernyataan 17	0,237386	0,1975	0,237386>0,1975	Valid
Pernyataan 18	0,264749	0,1975	0,264749>0,1975	Valid
Pernyataan 19	0,256288	0,1975	0,256288>0,1975	Valid
Pernyataan 20	0,298109	0,1975	0,298109>0,1975	Valid

Pernyataan 21	0,265441	0,1975	0,265441>0,1975	Valid
Pernyataan 22	0,286254	0,1975	0,286254>0,1975	Valid
Pernyataan 23	0,253325	0,1975	0,253325>0,1975	Valid
Pernyataan 24	0,227567	0,1975	0,227567>0,1975	Valid
Pernyataan 25	0,228863	0,1975	0,228863>0,1975	Valid
Pernyataan 26	0,309275	0,1975	0,309275>0,1975	Valid
Pernyataan 27	0,274694	0,1975	0,274694>0,1975	Valid
Pernyataan 28	0,274089	0,1975	0,274089>0,1975	Valid
Pernyataan 29	0,222497	0,1975	0,222497>0,1975	Valid
Pernyataan 30	0,352235	0,1975	0,352235>0,1975	Valid
Pernyataan 31	0,203426	0,1975	0,203426>0,1975	Valid
Pernyataan 32	0,269824	0,1975	0,269824>0,1975	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2016)

Berdasarkan data pada tabel 7 dapat diketahui bahwa 32 pernyataan yang diajukan mengenai variabel kesadaran politik adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Adapun perhitungan ini dilakukan dengan $n = 99$ pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 8. Uji Validitas Variabel Y Partisipasi Politik

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Kondisi	Hasil
Pernyataan 1	0,416944	0,1975	0,416944>0,1975	Valid
Pernyataan 2	0,475406	0,1975	0,475406>0,1975	Valid
Pernyataan 3	0,656106	0,1975	0,656106>0,1975	Valid
Pernyataan 4	0,57717	0,1975	0,57717>0,1975	Valid
Pernyataan 5	0,414164	0,1975	0,414164>0,1975	Valid
Pernyataan 6	0,529875	0,1975	0,529875>0,1975	Valid
Pernyataan 7	0,580476	0,1975	0,580476>0,1975	Valid
Pernyataan 8	0,511203	0,1975	0,511203>0,1975	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2016)

Berdasarkan data pada tabel 8 dapat diketahui bahwa 8 pernyataan yang diajukan mengenai variabel Y Partisipasi Politik adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Adapun perhitungan ini dilakukan dengan $n = 99$ pada taraf signifikansi 5%.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2002: 171) Sedangkan untuk mencari reliabilitas keseluruhan item adalah dengan mengoreksi angka korelasi yang diperoleh menggunakan rumus Koefisien Alfa (*CronBach*) yaitu:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sum \sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

α = Nilai reliabilitas

K = Jumlah item pertanyaan

$\sum \sigma_i^2$ = Nilai varians masing-masing item

$\sum \sigma_t^2$ = Varians total

Setelah hasil nilai Koefisien Alfa (*CronBach*) didapatkan maka nilai tersebut dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. Jika nilai Alfa lebih kecil dari angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. Sebaliknya Jika nilai hitung korelasi *product moment* lebih besar dari angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut reliabel.

Tabel 9. Nilai Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Tinggi
0.80 – 1.000	Sangat tinggi

Sumber: Sugiyono (2002: 183)

Berikut ini hasil uji reliabilitas kedua variabel penelitian:

Tabel 10. Uji Reliabilitas Variabel X Kesadaran Politik

Variabel X	R Alpha Cronbach	Interval Koefisien	Kesimpulan
Kesadaran Politik	0,620	0,600 – 0,799	Pengaruh Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)

Tabel 11. Uji Reliabilitas Variabel Y Partisipasi Politik

Variabel Y	R Alpha Cronvach	Interval Koefisien	Kesimpulan
Partisipasi Politik	0,608	0,600 – 0,799	Pengaruh Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)

Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 10 dan tabel 11 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini adalah reliable karena nilai koefisien alpha variabel X kesadaran politik 0,600 – 0,799 yang memiliki pengaruh kuat dan variabel Y partisipasi politik juga memiliki 0,600 – 0,799 yang berpengaruh kuat. Oleh karena itu, berdasarkan uji coba instrumen ini sudah reliabel seluruh item pernyataan yaitu dari 32 item pernyataan variabel X kesadaran politik dan 8 item pernyataan variabel Y partisipasi politik.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut reliabel atau dengan kata lain instrumen penelitian ini dapat dipercaya atau dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian ini dan olah data penelitian ini telah memenuhi syarat yang berkaitan dengan kebenaran dan ketepatannya.

K. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011: 243) dalam penelitian kuantitatif, analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.

1. Uji Regresi

Menurut Sugiyono (2009: 188) Regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel X dengan variabel Y. Adapun rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = Nilai variabel bebas yang diramalkan

a = Konstanta bila harga X = 0

b = Koefisien regresi

x = Nilai variabel independen

2. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005) uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Caranya melihat probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normalnya.

L. Uji Hipotesis

1. Pengujian Parsial (Uji t)

Menurut Sugiyono (2010: 262) statistik inferensial digunakan untuk menguji taraf signifikansi misalnya uji T pada tabel T, Uji F pada tabel F. Statisttik ini menggunakan rumus Uji “t” :

$$T_{hit} = r \sqrt{\frac{n - 2}{1 - rs^2}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya pasangan rank (sampel)

Distribusi (tabel t) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat keabsahan (dk = n-2)

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti valid, dan sebaliknya

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ tidak valid

Menurut Sugiyono (2007), setelah diketahui *standard error* dari koefisien regresi dan harga T hitung maka signifikansi koefisien regresi dapat diketahui atas dasar kriteria sebagai berikut:

Bila T hitung $>$ T tabel dengan taraf signifikansi 5% maka koefisien regresi signifikansi, berarti hipotesis diterima.

Bila T hitung $<$ T tabel dengan taraf signifikansi 5% maka koefisien regresi tidak signifikan, berarti hipotesis ditolak.

Sampel penelitian ini berjumlah 99 orang dan dilihat pada tabel T, nilai T tabel pada sampel 99 orang dengan taraf signifikan 5% bernilai.

2. Uji Stimultan (F)

Menurut Sugiyono (2005: 219) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama-sama digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut:

$$f = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Tahap-tahap pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut:

a) Mengetahui hipotesis nol dan hipotesis alternatif

Ho: $b_1=b_2=0$ Kesadaran politik tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap partisipasi politik.

Ho: $b_1 \neq b_2 \neq 0$ Kesadaran politik mempunyai pengaruh yang positif terhadap partisipasi politik.

b) Pengambilan Keputusan

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada derajat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai $F_{hitung} \geq$ dari nilai F_{tabel} , maka berarti variabel bebasnya secara serempak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama diterima.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Dan Asal-Usul Desa Hajimena

Berdasarkan dokumen Desa Hajimena tentang sekelumit asal usul Desa Hajimena secara etimologis, Hajimena sebenarnya berasal dari kata Aji, yang berarti ini dan Mena yang berarti duluan (dalam Bahasa Lampung). Kalau diartikan secara harfiah berarti penduduk yang bermukim di wilayah ini pertama kali (terlebih dahulu dari pendatang lain), yaitu Buay Sebiay yang asal mulanya berasal dari daerah Pagaruyung.

Pada abad ke 17, nenek moyang masyarakat Ajimena ini mengadakan migrasi kembali ke daerah Lampung Tengah tepatnya di kampung Gunung Haji, tidak lama kemudian mereka pindah kembali ke daerah Tegineneng yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Pesawaran. Tepatnya yaitu di Kampung Ruluk Helok yang dibuktikan dengan bukti sejarah berupa tempat pemandian para leluhur masyarakat Ajimena yang disebut Way Hilian, yang sampai akhirnya masyarakat Ajimena menempati wilayah sekarang, pada abad ke 18 dikarenakan penyusuran masyarakat ke hulu sungai menyusuri Way Kandis.

Adapun perubahan nama kampung dari Ajimena menjadi Hajimena tidak diketahui kepastian waktu (diperkirakan abad ke 19) serta alasan perubahan nama tersebut. Ada juga panggilan Buay Sebiay sebagai masyarakat asli Hajimena pada awalnya terdiri dari enam punyimbang (kerabat/saudara) yaitu:

1. Minak Bandar / M. Yusuf (Sesepuh Kampung)
2. Batin Dulu
3. Minak Raja Niti
4. Sultan Ratu / Hi. Abdur Rahman
5. Pesiwa Batin / Abdul Karim
6. Raja Usuh

Sejak tahun 1862, Kampung Ajimena telah memiliki Kepala Kampung yaitu Hambung Purba sebagai Kepala Kampung pertama. Hal ini dibuktikan dengan sebuah peninggalan sejarah berupa stempel kuning yang bertuliskan **Kampung Ajimena tahun 1862** dengan tulisan Aksara Lampung, dan semenjak tahun 1979 Kepala Kampung berubah menjadi Kepala Desa.

Daftar nama-nama pejabat kepala kampung/kepala Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 1862 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Daftar Nama-Nama Pejabat Kepala Desa Hajimena

No	Nama Pejabat	Jabatan	Periode/Tahun
1	Ambung Purba	Kepala Kampung	1862-1880
2	Tihang Ratu (poyang Th. Ratu)	Kepala Kampung	1981-1907
3	Hi. Matnuh	Kepala Kampung	1908-1925
4	Hi. Rahman Mularatu	Kepala Kampung	1926-1930
5	Pr. Bandar	Kepala Kampung	1930-1937
6	Raja Niti	Kepala Kampung	1938-1941
7	Minak Pengaturan	Kepala Kampung	1941-1944
8	Raja Usuh	Kepala Kampung	1944-1947
9	Hi. Tihang Ratu	Kepala Kampung	1948-1957
10	Sutan Turunan	Kepala Kampung	1958-1966
11	Hi. Abdur Rahman	Kepala Kampung	1966-1968
12	Mukhsin	Kepala Kampung	1968-1979
13	P. Simanjuntak	Kepala Desa	1979-1988
14	Anwar Anoem Sebiay	Kepala Desa	1988-1995
15	Hi. Natalia Anoem S	Kepala Desa	1995-1999
16	Rais Yusuf	Kepala Desa	1999-2008
17	Bahti Idris	Kepala Desa	2008-sekarang

Sumber: Monografi Desa Hajimena

B. Keterangan Demografi Desa Hajimena

1. Letak Geografis

Letak geografi Desa Hajimena, terletak diantara:

Sebelah Utara: Desa Pemanggilan

Sebelah Selatan: Kelurahan Rajabasa – Bandar Lampung

Sebelah Barat: Desa Kurungan Nyawa – Pesawaran

Sebelah Timur: Desa Sidosari

Luas wilayah Desa Hajimena adalah 750 Ha, letak geografis Desa Hajimena ada pada dataran rendah sedangkan kondisi topografi adalah datar dan ketinggian desa dari permukaan laut adalah 85 Meter. Klasifikasi Desa Hajimena merupakan Desa Swakarya. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah jasa. Di Desa Hajimena terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD) dan terdapat Lembaga Pemasarakatan Desa (LPM). Desa Hajimena terdiri dari Rukun Warga sebanyak 14 RW dan Rukun Tetangga sebanyak 53 RT dan jumlah Dusun di dalam Desa Hajimena sebanyak 7 Dusun, yang terdiri dari:

1. Dusun I Induk Kampung
2. Dusun II Way Layap
3. Dusun III Sinar Jati
4. Dusun IV Bataranila
5. Dusun V Perum Polri

6. Dusun VI Puri Sejahtera

7. Dusun VII Sidorejo

Jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan yang membawahi: 6 KM

Jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten/kota yang membawahi: 60
KM

Jarak dari kantor desa ke kantor provinsi yang membawahi: 13 KM

Jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten/kota lain yang terdekat: 8
KM

2. Di Bidang Pendidikan

Tabel 13. Jumlah sekolah atau sarana pendidikan yang berada di Desa Hajimena.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	
		Negeri	Swasta
A	Taman Kanak-kanak (TK)	-	5
B	Sekolah Dasar (SD) atau sederajat	2	-
C	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat	1	-
D	Akademi/Perguruan Tinggi atau yang sederajat	2	-

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2013

Berdasarkan tabel diatas di Desa Hajimena terdapat 5 taman kanak-kanak swasta yaitu TK-Alazar, TK Ar-Rasyid, TK Amanah, TK Harapan Jaya, TK-Aisyiyah. Terdapat 2 SD Negeri yaitu SDN 1

Hajimena dan SDN 2 Hajimena kemudian terdapat 1 SMP yaitu SMP Negeri 3 Natar dan terdapat 2 akademi/ perguruan tinggi yang sederajat yaitu Politeknik Negeri Lampung dan Poltekes.

3. Di Bidang Hukum

Di bidang hukum di Desa Hajimena masih terdapat kendala yang sering dihadapi seperti masih dijumpai pelanggaran peraturan yang ada, sehingga masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas baik itu pelanggaran karena rambu-rambu lalu lintas, etika berkendara, kelengkapan pengguna sepeda motor roda dua dan kelengkapan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor roda dua.

Desa Hajimena juga masih banyak dijumpai anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor, mereka juga tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap, padahal anak di bawah umur menggunakan kendaraan apalagi tidak melengkapi dirinya dengan pelindung kepala (helm) dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah melanggar peraturan. Kemudian hambatan lainnya terdapat pada penegakan hukum yang masih kurang khususnya Polisi Lalu Lintas di Hajimena dikarenakan bahwa Polisi Lalu Lintas tidak melaksanakan kinerja Polisi Lalu Lintas yang terangkum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Polisi Lalu Lintas.

Kendala yang selanjutnya adalah alergi terhadap aparat penegak hukum, masyarakat Desa Hajimena yang enggan terhadap Polisi Lalu Lintas karena menimbulkan banyak kasus penyuapan yang terjadi menimbulkan banyak tanggapan buruk terhadap kinerja dari Polisi Lalu Lintas itu sendiri, namun kondisi ini bisa di atasi dengan Polisi Lalu Lintas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yang sesuai dengan kinerja yang seharusnya dilaksanakan dan untuk para pengguna sepeda motor roda dua di Desa Hajimena dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

4. Keamanan

Tabel 14. Sarana Keamanan Lingkungan

No	Sarana Keamanan Lingkungan	Jumlah
1	Pos Hansip/Siskamling	7
2	Pos Polisi	2

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2013

Pada tabel 14 di atas, menunjukkan bahwa terdapat sarana keamanan lingkungan yang berupa Pos Hansip/Siskamling yang berjumlah 7 Pos Hansip yang terdapat di masing-masing dusun di Desa Hajimena. Sedangkan untuk Pos Polisi terdapat 2 Pos yang berada di daerah bunderan Desa Hajimena, adanya sarana keamanan lingkungan ini guna menciptakan keamanan dan ketertiban di Desa Hajimen.

C. Komposisi Penduduk Desa Hajimena

Jumlah penduduk Desa Hajimena sampai tahun 2013 adalah 14.884 Jiwa, terdiri dari:

1. Jumlah Laki – laki : 7.507 Jiwa
2. Jumlah Perempuan : 7.377 Jiwa
3. Jumlah Kepala Keluarga : 3.814 kepala keluarga.

(Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010)

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Komposisi Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Bila di tinjau dari umur dan jenis kelamin penduduk yang mendiami Desa Hajimena dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

No	Umur/Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	989	711	1700
2	5-9	880	702	1582
3	10-14	921	793	1714
4	15-19	1205	1351	2556
5	20-24	1305	1455	2760
6	25-50	1200	1300	2500
7	50 ke atas	1007	1065	2072

Jumlah	7.507	7.377	14.884
---------------	-------	-------	--------

Sumber : Monografi Desa Hajimena 2013

Pada tabel 15, menunjukkan bahwa di Desa Hajimena penduduk yang tergolong usia produktif berjumlah 7.816 orang yang terdiri dari 3.710 orang laki-laki, dan 4.106 orang perempuan. Sedangkan penduduk yang berusia Non-produktif berjumlah 7.068 orang, yang terdiri dari 3.797 orang laki-laki dan 3.271 orang Perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk yang berusia Produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk Non-produktif. Berbeda dengan kelompok umur usia produktif, jumlah perempuan lebih besar bila di bandingkan dengan jumlah laki-laki, sedangkan pada kelompok umur usia Non-produktif jumlah laki-laki lebih besar bila di bandingkan dengan jumlah perempuan.

2. Komposisi Penduduk Menurut Suku/Ras

Bila di tinjau dari suku/ras penduduk yang mendiami Desa Hajimena dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16. Komposisi Penduduk Menurut Suku/Ras.

No	Suku/Ras	Jumlah
1	Suku Batak	550 KK
2	Suku Jawa	1200 KK
3	Suku Lampung	1000 KK
4	Suku Padang	25 KK

5	Suku Sunda	1010 KK
6	Suku Tionghoa	15 KK
7	Suku Bali	14 KK
Jumlah		3.814 KK

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2013

Tabel 16 diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang berdomisili di Desa Hajimena adalah suku Jawa yaitu 1200 Kepala Keluarga, sedangkan suku pribumi yaitu Lampung berjumlah 1000 Kepala Keluarga, dan suku Sunda 1010 Kepala Keluarga. sedangkan Suku yang lainnya seperti Batak sebanyak 550 Kepala Keluarga, Suku Tionghoa 15 Kepala Keluarga, dan Bali 14 Kepala Keluarga.

3. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Bila di lihat dari segi agama, agama yang di anut oleh penduduk Desa Hajimena dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Komposisi Penduduk Menurut Agama.

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	13.884	93,3
2	Katolik	200	1,34
3	Protestan	750	5,04
4	Hindu	35	0,23
5	Budha	15	9,10
Jumlah		14.884	100,00

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2013

Tabel 17, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Hajimena menganut agama Islam yaitu sejumlah 13.884 orang (93.3 %), yang menganut agama katolik sejumlah 200 orang (1.34 %) dan penduduk Desa Hajimena ada yang menganut agama Protestan sebanyak 750 orang (5.04 %), Hindu sebanyak 35 orang (0.23 %), dan yang menganut agama Budha yaitu sebanyak 15 orang (0.10 %).

4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Bila di tinjau dari segi mata pencahariannya, maka dapat di lihat mata pencaharian penduduk Desa Hajimena pada tabel di bawah ini:

Tabel 18. komposisi penduduk menurut mata pencahariannya.

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	153
2	PNS	147
3	POLRI	25
4	TNI	15
5	Pedagang	77
6	Buruh Tani	103
7	Buruh Perusahaan	91
8	Buruh Bangunan	88
9	Sopir	13
10	Tukang Ojek	50

11	Pensiunan	130
12	Peternak	12
13	Dokter	4
14	Bidan	6
15	Wiraswasta	938

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2013

Tabel 18, menunjukkan bahwa di Desa Hajimena jumlah penduduk yang bermata pencaharian Wiraswasta adalah paling besar sebanyak 938 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian lainnya. Dengan demikian mata pencaharian penduduk di Desa Hajimena mayoritas berwiraswasta.

5. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Bila di lihat dari segi pendidikan penduduk Desa Hajimena dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	1170
2	Masih SD/Sederajat	1992
3	Tamat SLTP/Sederajat	1205
4	Masih SLTP/Sederajat	1549
5	Tamat SLTA/Sederajat	2380
6	Masih SLTA/Sederajat	2089

7	Tamat PT/Akademis	1009
8	Masih PT/Akademis	1123
9	Buta Huruf	576
10	Belum Sekolah	992
11	PAUD/TK	808
Jumlah		14.884

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2013

Tabel 19, menunjukkan bahwa penduduk Desa Hajimena tamat Sekolah Dasar/ sederajat sebanyak 1170 orang dan 1992 orang masih Sekolah Dasar. Selanjutnya, penduduk Desa Hajimena yang menempuh pendidikan SLTP sebanyak 1205 orang dan masih duduk dibangku SLTP yaitu sebanyak 1549 orang. Mayoritas penduduk Desa Hajimena adalah berpendidikan menengah keatas yaitu sebanyak 2380 tamatan SLTA dan 2089 masih duduk dibangku SLTA. Kemudian Untuk lulusan perguruan tinggi sebanyak 1009 orang dan 1123 orang masih duduk di perguruan tinggi. Sedangkan yang menunjukkan buta huruf sebanyak 567 orang, belum sekolah menunjukkan sebanyak 992 orang dan yang masih PAUD atau TK sebanyak 808 orang. Keadaan ini menunjukkan mayoritas penduduk Desa Hajimena adalah lulusan SLTA.

D. Penggunaan Dan Penguasaan Lahan Desa Hajimena

Bila di tinjau dari segi penggunaan dan penguasaan lahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Luas wilayah Menurut Jenis Penggunaannya.

No	Jenis Penggunaannya	Jumlah (Ha)
1	Tanah Perumahan dan Permukiman	300
2	Tanah Perkebunan	100
3	Tanah Ladang, Huma, Tegalan, Kebun, Kolam, Tambak, Tabat, Empang, Penggembalaan, dan Padang rumput.	220
4	Tanah Perkantoran dan Pertokoan	60
5	Tanah Persawahan	40
6	Bangunan Industri	30
Jumlah		750

Sumber: Monografi Desa Hajimena 2013

Berdasarkan tabel 20, terlihat bahwa sebagian besar tanah di pergunakan untuk perumahan dan pemukiman yaitu seluas 300 Ha. Kemudian tanah yang dipergunakan untuk perkebunan yaitu seluas 100 Ha. Tanah Ladang, Huma, Tegalan, Kebun, Kolam, Tambak, Tabat, Empang, Penggembalaan, dan Padang rumput seluas 220 Ha. Tanah perkantoran dan pertokoan seluas 60 Ha. Untuk tanah persawahan seluas 40 Ha. Kemudian untuk bangunan industri seluas 30 Ha. Keadaan ini menunjukkan bahwa

penggunaan dan penguasaan lahan di Desa Hajimena sebagian besar untuk perumahan dan pemukiman.

E. Sarana Transportasi Desa Hajimena

Di Desa Hajimena sebagian besar lalu lintas antar desa yaitu melalui darat dan jenis permukaan jalan yang terluas adalah aspal/beton. Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk di Desa Hajimena yaitu jenis angkutan yang terdapat seperti becak yang berada di sekitar bunderan Hajimena. Kemudian terdapat ojek sepeda motor di setiap jalan kecil dan di sekitar bunderan Hajimena dan kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat dan roda dua.

F. Visi Dan Misi Desa Hajimena

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat yang majemuk agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan diatas, maka untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap dan kebersamaan desa hajimena dapat mengalami kemajuan dan untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

1. Visi Desa Hajimena

“Dengan Kebersamaan Kita Tingkatkan Pembangunan Dan Taraf Hidup Masyarakat Yang Berdaya Guna Dan Dapat Diandalkan”

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat di Desa Hajimena baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 5 (lima) tahun ke depan Desa Hajimena mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi Desa Hajimena

Misi Desa Hajimena:

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada.
2. Bersama masyarakat dan kelambagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembagunan yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa hajimena yang aman, tentram dan damai.

4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berdaya guna dan dapat diandalkan.
6. Bersama masyarakat menggalakkan kegotong royongan di dalam segala hal.

G. Struktur Organisasi Desa Hajimena

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Hajimena Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan

Kepala Desa : Bahti Idris

Sekretaris Desa : -

Kepala Urusan Pemerintahan : -

Kepala Urusan Pembangunan : Abdul Roni

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat : Fahrudin Diriyabto,SE

Kepala Urusan Umum : Suci Dewi Aryanti,Amd

Kepala Urusan Keuangan : Saripah

Kepala Dusun I Induk Kampung : Drs. M. Syahnuri

Kepala Dusun II Way Layap : Hi. Hazairin, S.KM

Kepala Dusun III Sinar Jati : Drs. Mansahid

Kepala Dusun IV Perum Bataranila : Drs. Rosana

Kepala Dusun V Perum Polri : Trisna

Kepala Dusun VI Puri Sejahtera : Abdul Halim, S.KM

Kepala Dusun VII Sidorejo : Hennuhfi

VI. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat pada kegiatan pemilihan kepala desa tahun 2015 di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan persentase hasil analisis data masih di tingkatan atau indikator pengetahuan yakni 29,3%. masyarakat mengetahui kesadaran politik Persentase masyarakat dalam indikator pemahaman, 32,3% masyarakat tidak memahami kesadaran politik, di tingkatan selanjutnya 43,4% masyarakat cukup memiliki sikap kesadaran poliitk, lalu 48,4% masyarakat tidak mempunyai tindakan dalam kesadaran politik. Nilai rata-rata yang dihasilkan untuk kesadaran politik adalah 2,57 yang termasuk dalam kategori rendah. Dengan persentase yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran politik

maka dapat dikategorikan bahwa kesadaran politik masyarakat di Desa Hajimena rendah.

2. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2015 di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mayoritas masyarakat menjawab 31,3% sangat tidak berpartisipasi politik dalam hal kampanye, berperan aktif dalam Pilkades maupun ikut mensukseskan Pilkades itu sendiri. Dan nilai rata-rata yang dihasilkan untuk partisipasi politik adalah 2,53 yang termasuk kategori rendah. Dengan persentase yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak ikut berpartisipasi politik maka dapat dikategorikan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Hajimena rendah.
3. Berdasarkan output tersebut dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antara variabel independen dan dependen sebesar 0,328. Koefisien korelasi bertanda positif artinya korelasi yang terjadi antara kesadaran politik dengan partisipasi politik adalah searah, dimana semakin besar variabel independen maka akan diikuti oleh semakin besarnya variabel dependen. Pada penelitian ini nilai koefisien R adalah 0,328 atau 32,8%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi variabel independen (kesadaran politik) terhadap variabel dependen (partisipasi politik) yakni 32,8% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan sehubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pemilihan kepala desa sebagai ajang untuk memilih pemimpin di masyarakat sebaiknya dimanfaatkan sebagai jalan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sebagai wujud demokrasi. Dengan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara diharapkan masyarakat akan selalu terpanggil untuk berpartisipasi dalam kegiatan pilkades secara langsung.
2. Pemerintah, partai politik dan organisasi masyarakat lainnya harus turun untuk memberikan pencerahan dalam bentuk informasi kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga bermuara pada keikutsertaan dalam kegiatan pilkades.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkarim, Aim. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta: Grafindo
- Alfian. 1986. *Pemikiran Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- A. Rahman,.H,.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rieneka cipta. Jakarta
- Arman, Ys. Chaniago. 2002. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badudu dan Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Cholisin, Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.
- Firdaus, M.Azis. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.

- Gatara, Said. A.A & said, Dzulkiah. Moh. 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka setia.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- Henry Subiakto & Rachmah Ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Huntington P. Samuel. 2003. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koetjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Naning, Ramdlon. 1982. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Yogyakarta: Bina Ilmu.
- Notoatmodjo, Soekodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Rakhmat, Jalaludin. 1997. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rush, Michael dan Althof, Philip. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ruslan, Utsman Abdul Muis. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia
- Sarwono, Jonathan. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: Penerbit IKIP

- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Spradley dan Faisal. 1990. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Adi Pustaka
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Sosial (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wardhani, Diah. 2008. *Media Relations: Sarana Membangun Reputasi, Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan (Melalui Pandangan Teoritik, Legalisti, dan Implementasi)*. Bandung: Fokusmedia.

Skripsi

- Rahmanto. 2012. *Partisipasi Masyarakat Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur*. Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Progam Study Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Yakin, Moh. Aninul. 2013. *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013*. Universitas Negeri Surabaya.
- Kuhon, Theofilus. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di Desa Tonsealama Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa)*. Universitas Sam Ratulangi.

Undang-Undang

Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

WEB

<http://kpud-provinsilampung.com> (Di akses pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 14:00 wib)